



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;

Mengingat : . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6006);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA.

Pasal . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).

Pasal 2

- (1) Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp4.632.949.945.886,00 (empat triliun enam ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2020
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2020

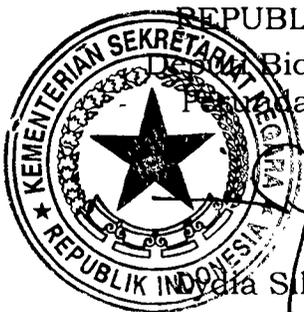
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
AD INTERIM,

ttd.

MOHAMMAD MAHFUD MD

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 168

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA



Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL
SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

**DAFTAR RINCIAN DAN NILAI
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA**

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
I	Instalasi Pembangkit Listrik		
1	Pembangkit Listrik Tenaga Air Peusangan yang berlokasi di Provinsi Aceh hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan I (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera I)	2007	Rp67.208.126.498,00
2	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Rongi (2x400 kW) yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Tenggara hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Selatan (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua)	2008, 2009, dan 2010	Rp10.584.513.304,00

3 Pembangkit . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
3	Pembangkit Listrik Tenaga Air Kusan yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan)	1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, dan 2000	Rp7.495.809.123,00
Sub Jumlah Instalasi Pembangkit Listrik (I)			Rp85.288.448.925,00
II	Instalasi Gardu Listrik Induk		
1	Gardu Induk 150kV Binjai yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan II (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera I)	2007	Rp568.222.000,00
2	Gardu Induk 150kV Namorambe yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan II (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera I)	2009 dan 2010	Rp9.877.844.000,00
3	Gardu Induk 150kV Sibolga yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan II (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera I)	2007	Rp800,00
4	Gardu Induk 150 kV Kambang yang berlokasi di Provinsi Sumatera Barat hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan III (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II)	2008	Rp26.026.640.000,00

5 Gardu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
5	Gardu Induk 150 kV Fajar Surya Ext yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali)	2011, 2012, dan 2013	Rp15.852.372.000,00
6	Gardu Induk 150 kV Bogor Baru II/ Tajur yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah I (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali)	2013 dan 2015	Rp14.350.090.342,00
7	Gardu Induk <i>New</i> Tasikmalaya (Lot 1: 500/150 kV <i>Conventional Switchgear for New Tasikmalaya Substation (Erection)</i>) yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah I (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali)	2007	Rp61.563.466.001,00
8	Gardu Induk 150 kV Jatirangon II yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah I (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali)	2011 dan 2012	Rp12.346.317.571,00
9	Gardu Induk 150 kV Jatiluhur Baru Incomer yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah I (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali)	2011 dan 2012	Rp17.490.822.144,00
10	Gardu Induk 150 kV Arjawinangun Baru yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat hasil kegiatan Unit Induk	2013 dan 2015	Rp238.397.927,00

Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
	Pembangunan Jawa Bagian Tengah I (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali)		
11	Gardu Induk 150 kV Tambun yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah I (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali)	2001	Rp888.734.000,00
12	Gardu Induk 150 kV tersebar yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah I (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali)	1998/1999	Rp9.678.827.004,00
13	Gardu Induk 150 kV Paciran yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali I (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali)	2007 dan 2008	Rp9.023.054.000,00
14	Gardu Induk 150 kV New Wlingi yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali I (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali)	2011, 2012, dan 2013	Rp37.474.845.220,00
15	Gardu Induk 150 kV Singkawang yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan)	2011	Rp29.089.707.000,00

16 Gardu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
16	Gardu Induk 150 kV Kota Baru yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan)	2007	Rp24.926.975.000,00
17	Gardu Induk 150 kV Barikin yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Selatan hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Tengah (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan)	2007	Rp8.926.790.000,00
18	Gardu Induk 150 kV Kayu Tangi yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Selatan hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Tengah (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan)	2008	Rp27.686.076.000,00
19	Gardu Induk 150 kV Sampit yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Tengah hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Tengah (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan)	2009, 2010, dan 2011	Rp56.823.310.999,00
20	Gardu Induk 150 kV Palangkaraya yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Tengah hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Tengah (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan)	2011	Rp15.078.084.000,00

21 Gardu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
21	Gardu Induk 150 kV Kasongan yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Tengah hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Tengah (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan)	2011, 2012, dan 2013	Rp69.649.772.790,00
22	Gardu Induk 150 kV Tengkawang yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan)	2011	Rp16.988.443.451,00
23	Gardu Induk 150 kV Bontang yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan)	2009, 2010, dan 2011	Rp58.423.394.000,00
24	Gardu Induk 150 kV Palaran yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan)	2007	Rp9.030.130.000,00
25	Gardu Induk 150 kV Sambutan yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan)	2007 dan 2010	Rp34.944.370.143,00

26 Gardu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
26	Gardu Induk 150 kV Tanjung Merah (<i>New</i>) yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Utara hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua)	2011 dan 2012	Rp17.250.923.290,00
27	Gardu Induk 150 kV Tallo Lama yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Selatan (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua)	2011 dan 2012	Rp7.946.108.641,00
28	Gardu Induk 150 kV Bontoala (Ext) yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Selatan (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua)	2011 dan 2012	Rp16.482.727.905,00
Sub Jumlah Instalasi Gardu Listrik Induk (II)			Rp608.626.446.228,00
III	Instalasi Jaringan Transmisi		
1	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Sidikalang – Subulussalam yang berlokasi di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan II (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera I)	2009	Rp49.572.661.000,00
2	Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 275 kV GI Binjai – PLTU Sumut yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara hasil kegiatan Unit Induk	2008	Rp176.638.668.750,00

Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
	Pembangunan II (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera I)		
3	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Padang Sidempuan - Panyabungan yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan II (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera I)	2009	Rp46.235.919.000,00
4	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Galang - Namorambe yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan II (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera I)	2009, 2010, dan 2011	Rp77.835.304.000,00
5	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Galang - Tanjung Morawa yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan II (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera I)	2009, 2010, dan 2011	Rp46.569.066.800,00
6	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Rantau Prapat - Kota Pinang yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan II (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera I)	2006	Rp244.007.236,00
7	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Garuda Sakti - <i>New Garuda Sakti</i> yang berlokasi di Provinsi Riau hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan II (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera I)	2009	Rp20.865.314.000,00

8 Saluran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
8	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Garuda Sakti – Pasir Putih yang berlokasi di Provinsi Riau hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan II (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera I)	2009	Rp36.069.738.000,00
9	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Kota Pinang – Bagan Batu yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan II (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera I)	2006	Rp749.456.400,00
10	Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 275 kV Betung – Sungai Lilin – Aur Duri yang berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan III (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II)	2008	Rp92.452.887.000,00
11	Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 275 kV Kiliranjau – Payakumbuh yang berlokasi di Provinsi Sumatera Barat hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan III (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II)	2009	Rp432.464.825.247,00
12	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Kambang - Bungus yang berlokasi di Provinsi Sumatera Barat hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan III (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II)	2007	Rp51.706.125.000,00

13 Saluran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
13	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV - Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 500 kV Suralaya Baru Incomer yang berlokasi di Provinsi Banten hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali)	2007, 2008, dan 2009	Rp18.484.466.000,00
14	Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 500 kV Bojonegara - Suralaya yang berlokasi di Provinsi Banten hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali)	2007, 2008, dan 2009	Rp73.683.089.740,00
15	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Cigareleng II Incomer yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah I (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali)	2007, 2008, dan 2009	Rp3.454.423.500,00
16	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Mandiracan - Cikijing yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah I (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali)	2007, 2008, dan 2009	Rp86.555.726.400,00
17	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Cikedung Incomer (Jatibarang - Haurgeulis) yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah I (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali)	2007, 2008, dan 2009	Rp3.404.397.700,00

18 Saluran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
18	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Kiara Condong II Incomer yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah I (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali)	2007, 2008, dan 2009	Rp4.294.452.800,00
19	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Cibatu - Cileungsi yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah I (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali)	2007, 2008, dan 2009	Rp48.277.992.400,00
20	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Cibabat II Incomer yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah I (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali)	2007, 2008, dan 2009	Rp7.337.080.300,00
21	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Karang Nunggal - Tasikmalaya <i>New</i> yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah I (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali)	2007, 2008, dan 2009	Rp14.033.570.432,00
22	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV <i>New</i> Ujung Berung - Ranca Kasumba dikoreksi menjadi <i>New</i> Ranca Kasumba - Ranca Ekek - Ujung Berung yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah I (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali)	2007, 2008, dan 2009	Rp25.197.255.600,00

23 Saluran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
23	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV PLTU 2 Jawa Barat - TX. Cibadak Baru & TX. Lembar Situ yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah I (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali)	2007, 2008, dan 2009	Rp229.113.748.600,00
24	Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 500 kV Ujung Berung Incomer <i>New</i> yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah I (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali)	2007, 2008, dan 2009	Rp3.887.695.900,00
25	<i>Access Road Upper Cisokan</i> PLTP Cisokan yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah I (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali)	2009 dan 2010	Rp20.315.465.347,00
26	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV PLTU 1 Jabar - Kosambi Baru - Sukamandi yang berlokasi di Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah I (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali)	2007, 2008, dan 2009	Rp252.149.775.390,00
27	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Bekasi Utara Incomer yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah I (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali)	2007, 2008, dan 2009	Rp2.000.879.100,00

28 Saluran . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
28	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Cikarang Lippo Incomer yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah I (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali)	2007, 2008, dan 2009	Rp2.294.198.500,00
29	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Patuha - Lagadar yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah I (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali)	2004	Rp6.771.600.000,00
30	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Pedan - Kentungan yang berlokasi di Provinsi DI Yogyakarta hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah II (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali)	1996/1997, 1999/2000, 2000, dan 2001	Rp9.630.489.527,00
31	Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 500 kV Tasik - Depok III Inc yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah I (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali)	2003, 2004, dan 2005	Rp427.315.141.467,00
32	Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 500 kV Klaten - Tasik - Depok III yang berlokasi di Provinsi DI Yogyakarta hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Tengah II (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali)	2006	Rp1.246.827.676,00

33 Inland . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
33	<i>Inland Transport Transmission Lines for Central Java & East Java & Bali</i> yang berlokasi di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Bali hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali I (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali)	1999/2000, 2001, 2002, 2003, dan 2004	Rp30.840.421.727,00
34	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Sidoarjo Incomer yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali I (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali)	2007, 2008, dan 2009	Rp3.116.396.800,00
35	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Purwosari - Incomer yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali I (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali)	2007, 2008, dan 2009	Rp1.842.170.000,00
36	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Lamongan - Brondong - Paciran yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali I (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali)	2007, 2008, dan 2009	Rp14.707.581.480,00
37	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Bambe Incomer yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali I (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali)	2007, 2008, dan 2009	Rp20.783.155.800,00

38 Saluran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
38	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Sambikerep Incomer yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali I (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali)	2007, 2008, dan 2009	Rp3.110.211.500,00
39	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Lamongan - Paciran yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali I (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali)	2005	Rp43.903.629.000,00
40	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Celukan Bawang - Kapal yang berlokasi di Provinsi Bali hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali I (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali)	2007, 2008, dan 2009	Rp231.437.822.621,00
41	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Parit Baru - Kota Baru yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan)	2007	Rp28.556.952.000,00
42	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Asam Asam - Batu Licin yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Selatan hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Tengah (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan)	2009, 2010, dan 2011	Rp164.581.673.039,00

43 Saluran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
43	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Batu Licin – Asam Asam yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Selatan hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Tengah (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan)	1995/1996	Rp391.650.000,00
44	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Barikin - Amuntai yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Selatan hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Tengah (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan)	2007	Rp10.612.856.000,00
45	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Asam Asam - Mantuil yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Selatan hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Tengah (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan)	2008	Rp172.485.284.000,00
46	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Seberang Barito - Kayu Tangi yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Selatan hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Tengah (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan)	2008	Rp17.129.150.000,00
47	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Palangkaraya - Sampit yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Tengah hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian	2009, 2010, dan 2011	Rp428.600.275.390,00

Tengah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
	Tengah (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan)		
48	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Muara Teweh - Puruk Cahu Sec 1 yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Tengah hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Tengah (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan)	2013, 2014, dan 2015	Rp10.961.002.504,00
49	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Muara Teweh - Puruk Cahu Sec 2 yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Tengah hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Tengah (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan)	2013, 2014, dan 2015	Rp3.705.972.183,00
50	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Muara Teweh - Puruk Cahu Sec 3 yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Tengah hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Tengah (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan)	2013, 2014, dan 2015	Rp24.210.007.039,00
51	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Muara Teweh - Puruk Cahu Sec 4 yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Tengah hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Tengah (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan)	2013, 2014, dan 2015	Rp26.465.209.902,00

52 Saluran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
52	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Palaran - Senipah Sec 1 yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan)	2013, 2014, dan 2015	Rp21.112.370.913,00
53	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Tanjung - Kuaro yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan)	1995/1996	Rp486.183.000,00
54	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Kuaro - Karang Juang yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan)	1995/1996	Rp548.708.000,00
55	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Sambutan - Bontang yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan)	2009, 2010, dan 2011	Rp213.469.570.852,00
56	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Palaran - Sambutan yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (Eks.	2007	Rp25.166.074.000,00

Satuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
	Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan)		
57	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Palaran - Senipah Sec 2 yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan)	2013, 2014, dan 2015	Rp21.034.718.552,00
58	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Tenggarong - Kota Bangun Sec 1 yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan)	2013, 2014, dan 2015	Rp24.622.978.750,00
59	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Tenggarong - Kota Bangun Sec 2 yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan)	2013, 2014, dan 2015	Rp26.360.998.437,00
60	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Paniki - Tanjung Merah yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Utara hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua)	2012	Rp9.134.834.765,00

61 Saluran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
61	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Sengkang - Siwa (Sec.2. Tip.120-GI.Siwa) yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Selatan (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua)	2011 dan 2012	Rp46.872.379.652,00
62	Saluran Udara Tegangan Tinggi 70 kV Palu Baru - Talise yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Tengah hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua)	2012	Rp6.672.657.591,00
63	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Palu Baru - Silae yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Tengah hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Utara (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua)	2012	Rp9.443.033.294,00
64	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Tanjung Bunga - Bontoala yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Selatan (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua)	2007	Rp19.269.466.825,00
Sub (III)	Jumlah Instalasi Jaringan Transmisi		Rp3.932.487.644.428,00
IV	Instalasi Jaringan Distribusi		

1 Jaringan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
1	Jaringan Listrik yang berlokasi di Provinsi Aceh hasil kegiatan Unit Induk Wilayah Aceh (Eks. Project Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral)	2009	Rp6.547.406.305,00
	Sub Jumlah Instalasi Jaringan Distribusi (IV)		Rp6.547.406.305,00
	Jumlah		Rp 4.632.949.945.886,00

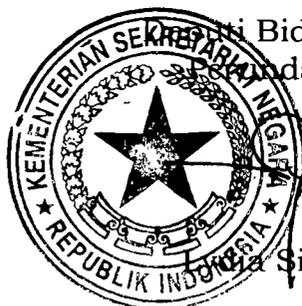
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Di Bidang Hukum dan
Undang-undangan,



Silvanna Djaman